

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konsep inklusi keuangan mulai mendapatkan perhatian luas pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang telah meruntuhkan perekonomian akibat *subprime mortgage*. Krisis ini dimulai dari masalah perumahan di Amerika Serikat yang berdampak pada sektor perbankan dan akhirnya berkembang menjadi krisis keuangan global yang melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Dampak dari krisis tersebut dirasakan terutama oleh kelompok berpendapatan rendah dan tidak tetap, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, individu tanpa dokumen identitas resmi, serta kelompok marginal yang umumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan dimana jumlah mereka yang tidak terdaftar sangat tinggi di negara-negara berkembang (Aginta et al., 2018). Respon dari krisis tersebut membuat banyak negara meluncurkan program stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara mereka dan juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Seiring berjalannya waktu, konsep inklusi keuangan mendapat sorotan global melalui *Leaders Summit G20* di Meksiko, yang menandai dimulainya *Financial Peer Learning Program* (FPLP) serta pembentukan *Global Partnership on Financial Inclusion* (GPII). Upaya memperkuat akses terhadap inklusi keuangan turut didukung dengan diterbitkannya sembilan prinsip dasar inovasi inklusi keuangan, yang menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kepemimpinan, keberagaman, inovasi, perlindungan, pemberdayaan, kolaborasi, pemahaman, proporsionalitas, dan pengaturan kerangka kerja. Sejak saat itu, berbagai forum internasional di bidang keuangan mulai secara intensif mengarahkan perhatian dan kegiatannya pada isu-isu yang berkaitan dengan inklusi keuangan seperti *Asian Development Bank* (ADB), *World Bank*, CGAP, APEC, *Alliance for*

Financial Inclusion (AFI), termasuk *standard body* seperti BIS dan *Financial Action Task Force* (FATF), termasuk negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia.

Inklusi keuangan telah mengambil peran sentral dalam mendorong pembangunan ekonomi global, dengan perhatian khusus pada negara-negara berkembang. Inklusi keuangan menjadi pembahasan yang sangat penting sehingga muncul dalam nomor 8 dari 17 agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*). Inklusi keuangan dianggap penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) karena rumah tangga miskin dan pengusaha mikro menghadapi tantangan yang dapat diatasi oleh layanan keuangan berbasis digital (Tay et al., 2022). Melalui akses terhadap layanan keuangan, inklusi keuangan membantu mengubah aliran pendapatan yang tidak teratur menjadi aset yang dapat diandalkan untuk keperluan harian yang diharapkan dapat meminimalisir tantangan utama bagi masyarakat yang berada di dasar piramida ekonomi (World Bank Group, 2021).

Menurut World Bank (2023), inklusi keuangan digambarkan pada penyediaan akses inklusif terhadap layanan keuangan formal, termasuk tabungan, pinjaman, asuransi, dan rekening bank, ditujukan bagi semua kalangan, terutama masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan. Inklusi keuangan memastikan akses gratis penggunaan, layanan keuangan yang sesuai untuk semua orang dan bisnis dengan biaya terjangkau dan partisipasi dalam masyarakat dari kelompok-kelompok yang kurang beruntung berdasarkan hak dan kewajiban yang setara (Ozili, 2021).

Di seluruh dunia, tercatat dua miliar orang tidak memiliki akses ke produk keuangan, seperti rekening giro. Secara khusus, kelompok besar masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan keuangan, baik karena tidak ada bank di daerah mereka atau karena bank tidak menganggap mereka layak mendapatkan kredit (Manyika et al., 2016). Oleh karena itu, inklusi keuangan berarti memberikan akses kepada mereka. Terlebih saat Pandemi COVID-19, fenomena tersebut menyebabkan peningkatan kerja dari rumah, penutupan sementara bank, toko, restoran, dan beberapa pedagang menolak pembayaran

tunai. Semua itu dilakukan dalam rangka mempercepat penggunaan akun pembayaran berbasis digital (Sahay et al., 2020).

Dengan kemudahan yang lebih merata terhadap layanan keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, mampu merasakan kemudahan mengakses layanan keuangan yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mempercepat pertumbuhan digitalisasi ekonomi (Rumondang et al., 2020). Menurut World Bank (2022), pada tahun 2021, tercatat 76% populasi orang dewasa di dunia telah memiliki rekening. Namun, kepemilikan rekening keuangan telah menjadi hal yang umum di negara maju, sementara mayoritas individu dewasa tanpa akun bank masih ditemukan di negara berpendapatan menengah. Layanan akses keuangan digital, termasuk yang melibatkan penggunaan ponsel kini telah diluncurkan di lebih dari 98 negara, dengan beberapa diantaranya mencapai skala yang signifikan.

Pada awal 2021, World Bank melaporkan terdapat lebih dari 1,35 miliar *mobile account ownership* yang terdaftar di seluruh dunia. Hasilnya, jutaan masyarakat kelas bawah yang sebelumnya tidak terlayani dan kurang terlayani bertransisi dari penggunaan uang tunai menuju layanan keuangan formal dan kini semakin didorong melalui pemanfaatan ponsel dan teknologi digital untuk mengakses berbagai layanan pembayaran. Berdasarkan laporan tersebut, tingkat inklusi keuangan di negara berkembang masih tertinggal dari negara maju, yang menciptakan tantangan serius dalam upaya pembangunan berkelanjutan. (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Berikut data *financial inclusion* di dunia negara maju dan negara berkembang pada tahun 2014-2021.



Gambar 1.1 Data *Financial Inclusion* di Negara Maju dan Negara Berkembang

Sumber: *World Bank*

Dari data tersebut, terdapat perbedaan yang cukup terlihat pada negara-negara yang memiliki pendapatan tinggi dengan pendapatan menengah (berkembang). Sekitar lebih dari 80% orang dewasa di negara maju sudah memiliki akun bank dan menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 hingga 2021. Kepemilikan akun negara berkembang di kawasan ASEAN memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga dihadapkan pada tantangan struktural dan sistemik yang beragam. Berdasarkan laporan *Global Findex Database* dari World Bank tahun 2021, sekitar 1,4 miliar penduduk global masih menghadapi kesulitan terhadap layanan keuangan formal, dan sebagian diantaranya berada di negara-negara berkembang. Di kawasan ASEAN, meskipun perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membantu memperluas akses ke layanan keuangan, disparitas antarnegara masih tinggi. Misalnya, Kamboja dan Vietnam menunjukkan peningkatan signifikan dalam inklusi keuangan, sementara negara-negara seperti Filipina dan Laos masih tertinggal (Fernandez & Rakotomalala, 2020).

Negara berpendapatan menengah merujuk pada kategori ekonomi yang ditetapkan berdasarkan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita tahunan suatu negara. Bank Dunia (World Bank) mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kelompok utama: berpendapatan rendah, menengah bawah, menengah atas, dan tinggi. Negara berpendapatan menengah terdiri dari dua

subkategori, yaitu menengah bawah (*lower-middle income*) dengan GDP per kapita antara USD 1.136 hingga USD 4.465, dan menengah atas (*upper-middle income*) dengan GDP per kapita antara USD 4.466 hingga USD 13.845 per tahun (World Bank, 2023). Klasifikasi ini penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, alokasi bantuan internasional, serta penilaian kinerja ekonomi suatu negara.

Negara-negara dalam kategori berpendapatan menengah kerap menghadapi tantangan ganda, yaitu mengatasi kemiskinan sekaligus mempercepat pertumbuhan untuk mencapai status negara maju. Dalam penelitian oleh Felipe et al., (2012), istilah "*middle-income trap*" mengacu pada kondisi ketika negara-negara berpendapatan menengah mengalami stagnasi pertumbuhan dan kesulitan bertransisi menjadi negara berpendapatan tinggi. Faktor-faktor seperti ketergantungan pada sektor manufaktur berbiaya rendah, kurangnya inovasi teknologi, serta lemahnya institusi dan rendahnya sumber daya manusia masih menjadi penyebab utama stagnasi tersebut.

Disparitas antara negara berpendapatan menengah tinggi dan menengah ke bawah di kawasan ASEAN sangat nyata dalam konteks inklusi keuangan, yang mencerminkan ketimpangan akses dan pemanfaatan layanan keuangan di antara negara-negara tersebut. Tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi, infrastruktur keuangan yang lebih canggih, dan akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan, kredit, dan teknologi keuangan merupakan ciri khas negara-negara berpenghasilan menengah ke atas seperti Singapura dan Malaysia. Pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan regulasi yang mendorong terciptanya industri keuangan yang inklusif merupakan faktor-faktor yang mendukung hal ini (Karlina et al., 2017).

Lebih lanjut, penelitian Karlina et al., (2017) juga mengemukakan bahwa sebaliknya, negara-negara berpendapatan menengah ke bawah seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (kelompok CLMV) masih menghadapi tantangan besar dalam memperluas inklusi keuangan. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat literasi keuangan, dan hambatan akses ke layanan keuangan formal menyebabkan sebagian besar masyarakat di negara-

negara ini masih bergantung pada sistem keuangan informal. Selain itu, disparitas keterampilan dan pendidikan memperparah kesenjangan ini, karena masyarakat berpendapatan rendah sulit mengakses layanan keuangan digital atau produk keuangan yang lebih kompleks.

Disparitas ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi antar negara ASEAN. Negara-negara berpendapatan menengah tinggi cenderung mampu memanfaatkan teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi, sementara negara-negara berpendapatan menengah ke bawah harus berjuang dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional (Wanof, 2023).

IFI atau *index financial inclusion* merupakan metrik atau indikator untuk menilai tingkat inklusi keuangan suatu negara. Pertimbangan yang diperlukan dalam inklusi keuangan yakni total penduduk yang memiliki rekening bank, jumlah penduduk yang memiliki akses ke layanan perbankan, serta kualitas layanan keuangan yang tersedia. Bila negara-negara memiliki peningkatan terhadap aspek tersebut, maka kemungkinan tingkat inklusi keuangan di negara tersebut juga cukup tinggi. Berikut data *index financial inclusion* (IFI) di negara-negara berkembang kawasan ASEAN tahun 2014-2023:

Tabel 1.1 *Index Financial Inclusion* Negara Berkembang Kawasan ASEAN

Negara	<i>Index Financial Inclusion</i>									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kamboja	0,31	0,34	0,37	0,40	0,44	0,48	0,55	0,65	0,72	0,84
Laos	0,21	0,32	0,36	0,43	0,44	0,52	0,58	0,64	0,72	0,80
Indonesia	0,36	0,41	0,47	0,52	0,49	0,48	0,63	0,62	0,55	0,49
Vietnam	0,22	0,30	0,37	0,40	0,46	0,52	0,59	0,66	0,67	0,71
Thailand	0,43	0,47	0,46	0,47	0,49	0,47	0,56	0,56	0,52	0,52

Sumber: IMF *Financial Access Survey* 2024, Data diolah oleh Penulis

Dari data tersebut, masing-masing negara berkembang kawasan ASEAN memiliki perbedaan peningkatan inklusi keuangan. Angka tersebut menggambarkan fluktuasi kepemilikan akun dari berbagai negara berkembang pendapatan menengah ke bawah kawasan ASEAN. Berbagai penelitian

menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan institusional memiliki pengaruh besar terhadap inklusi keuangan. Faktor-faktor seperti pendapatan per kapita, literasi keuangan, penetrasi internet, jumlah bank, hambatan infrastruktur, dan stabilitas politik memainkan peran yang berbeda di berbagai kawasan di dunia (Evans, 2023).

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator terpenting yang menentukan tingkat stabilitas ekonomi suatu negara. Indikator ini mengukur rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap individu dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dihitung dalam satu tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan untuk menilai tingkat kemakmuran, mengidentifikasi ketimpangan ekonomi, serta menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2015).

Dalam konteks negara berkembang di kawasan ASEAN, pendapatan per kapita memiliki peran dalam mempengaruhi sejauh mana inklusi keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan jangka panjang serta merepresentasikan faktor ekonomi (Erlando et al., 2020). Orang-orang cenderung mampu memperoleh dan menggunakan layanan keuangan formal ketika pendapatan per kapita mereka lebih tinggi. Sebaliknya, rendahnya pendapatan per kapita dapat menjadi hambatan signifikan terhadap inklusi keuangan, karena individu dengan pendapatan rendah sering kali menghadapi keterbatasan dalam memenuhi persyaratan minimum untuk membuka rekening bank atau mendapatkan kredit (Fayyad & Al-Sinnawi, 2024).

Selain itu, variasi pendapatan per kapita di negara ASEAN mencerminkan perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi dan infrastruktur keuangan. Negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, seperti Singapura, akan memiliki sistem keuangan yang lebih berkembang, sehingga memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas. Sementara itu, negara-negara dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah, seperti Kamboja dan Laos, menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memperluas akses ke layanan keuangan formal (Sarma & Pais, 2011).



Gambar 1.2 Pendapatan Per Kapita Negara-negara Kawasan ASEAN

Sumber: *Good News*, diambil dari World Bank dan OECD

Dari data tersebut, terlihat bahwa negara Singapura masih memimpin pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN sebesar USD 84,734.3 yang mencerminkan ekonomi yang sangat maju dengan sektor keuangan dan teknologi yang kuat. Sementara itu, negara berkembang lain seperti Indonesia, hanya memiliki pendapatan per kapita sebesar USD 4,940.5 dimana Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tetapi masih menghadapi tantangan dalam distribusi pendapatan dan diikuti oleh negara-negara berkembang lain seperti Vietnam, Filipina, Laos, dan Kamboja, Timor-Leste, dan Myanmar yang masih memiliki tantangan dalam peningkatan pendapatan per kapita.

Penelitian Juniyar (2023) menunjukkan bahwa orang biasanya memiliki permintaan dan kemampuan lebih besar untuk memperoleh layanan keuangan ketika pendapatan mereka meningkat. Namun, terdapat gap dimana meskipun pendapatan per kapita meningkat di beberapa wilayah, tingkat inklusi keuangan belum optimal karena faktor lain yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan saja tidak cukup tanpa diiringi dengan akses yang memadai.

Selain pendapatan per kapita, faktor akses terhadap layanan keuangan formal seperti ketersediaan institusi bank komersial juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi inklusi keuangan di negara-negara berkembang kawasan

ASEAN. Jumlah bank komersial mencerminkan tingkat penetrasi sistem perbankan dalam suatu negara, yang berkontribusi pada ketersediaan dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal (Wibowo et al., 2023). Jumlah bank komersial menjadi faktor institusional dalam peningkatan inklusi keuangan. Negara dengan jumlah bank komersial yang lebih banyak cenderung memiliki jaringan cabang yang lebih luas, yang memungkinkan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, untuk mengakses layanan keuangan.

Jumlah bank komersial yang tinggi juga mendorong persaingan di sektor perbankan, yang dapat menghasilkan inovasi produk, peningkatan efisiensi operasional, serta penurunan biaya layanan keuangan. Kondisi ini sangat mendukung peningkatan inklusi keuangan karena membuat layanan keuangan lebih terjangkau dan relevan bagi berbagai segmen masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan jumlah bank komersial dapat menghambat inklusi keuangan, terutama di wilayah yang kurang terlayani (Wang et al., 2021).

Meskipun begitu, penelitian Juniya (2023) juga menyebutkan bahwa keterbatasan jumlah dan jangkauan bank komersial menjadi hambatan utama, terutama di daerah terpencil, sehingga masyarakat sulit mengakses layanan keuangan formal. Di negara berkembang kawasan ASEAN, jumlah bank komersial mayoritas hanya berada di sekitar angka 30-40 bank dengan angka yang masih naik dan turun setiap tahunnya.

Berikut data Jumlah Bank Komersial di negara-negara berkembang kawasan ASEAN tahun 2014-2023:

Tabel 1.2 Data Jumlah Bank Komersial Negara Berkembang Kawasan ASEAN

Negara	Jumlah Bank Komersial									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kamboja	36	36	36	39	43	47	51	54	58	58
Laos	37	41	41	41	42	42	43	43	41	34
Indonesia	119	118	116	115	115	110	109	107	106	105
Vietnam	47	43	43	46	46	46	46	46	46	46
Thailand	30	31	30	30	30	30	30	29	28	28

Sumber: IMF *Financial Access Survey* 2024, Data diolah oleh Penulis

Dari tabel 1.2, dapat diketahui bahwa hanya Indonesia yang memiliki jumlah bank komersial di angka lebih dari 100 dan beberapa negara lainnya memiliki jumlah bank yang masih kurang. Jika dilihat dari data tersebut, masih banyak masyarakat menengah ke bawah yang belum beralih menggunakan sektor perbankan dalam transaksi keuangan dan masih mempercayakan transaksi secara konvensional dibandingkan secara digital menggunakan ATM. Namun menariknya, angka tersebut bersifat fluktuatif, dimana dari tahun ke tahun terdapat perubahan jumlah bank komersial yang dimiliki oleh tiap negara. Sebagai contoh negara Laos, pada tahun 2015 hingga 2022 memiliki jumlah bank komersial di angka lebih dari 40 namun menurun secara drastis di tahun 2023 menjadi 34. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah bank komersial yang ada di tiap negara mencerminkan peningkatan inklusi keuangan dari negara tersebut atau sebaliknya.

Selain faktor-faktor seperti pendapatan per kapita dan jumlah bank komersial, hambatan infrastruktur juga menjadi tantangan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan di dunia, yang dalam hal ini juga merujuk di negara-negara berkembang kawasan ASEAN (Lotter & Okoro, 2025). Infrastruktur yang tidak memadai, seperti keterbatasan jaringan transportasi, akses internet yang terbatas, dan kurangnya fasilitas teknologi informasi, dapat menghambat penyediaan layanan keuangan formal, terutama di daerah pedesaan dan terpencil (Sefrina, 2023). Infrastruktur yang buruk mengakibatkan biaya operasional yang tinggi bagi lembaga keuangan dan mengurangi efisiensi dalam distribusi layanan keuangan (Teuku et al., 2023).

Ketersediaan infrastruktur digital yang baik, seperti jaringan internet yang stabil dan luas, sangat penting untuk mendukung perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk *mobile banking* dan layanan keuangan digital lainnya (Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, 2023). Negara-negara yang memiliki infrastruktur digital yang lebih maju cenderung mengalami peningkatan inklusi keuangan yang lebih cepat karena memungkinkan akses yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat luas (Ozili,

2018). Berikut data hambatan infrastruktur di negara-negara berkembang kawasan ASEAN tahun 2014-2023:

Tabel 1.3 Data Hambatan Infrastruktur Negara Berkembang Kawasan ASEAN

Negara	Hambatan Infrastruktur									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kamboja	0,238	0,278	0,278	0,278	0,317	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
Laos	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436
Indonesia	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
Vietnam	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,119
Thailand	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,040	0,040

Sumber : OECD, Data diolah oleh Penulis

Dari data tersebut, masih terdapat beberapa negara di kawasan ASEAN yang memiliki hambatan terhadap konektivitas jaringan infrastruktur, seperti Kamboja dan Laos dengan angka sebanyak 0,2% hingga 0,4%. Minimnya keberadaan *smartphone* dan keterbatasan koneksi terhadap jaringan internet masih cukup tinggi untuk terakses di negara-negara tersebut. Padahal, melalui aplikasi *smartphone*, masyarakat di daerah terpencil bisa mengakses produk keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau (Friedline et al., 2020). Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, memahami faktor penentu inklusi keuangan di kawasan ASEAN menjadi semakin penting. Hal ini karena ketersediaan layanan keuangan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan inklusi keuangan tetapi juga pada sejauh mana layanan tersebut dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh masyarakat (Suprpti et al., 2024).

Banyak penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan di negara berkembang. Namun, dari penelitian sebelumnya, seperti penelitian Fitri et al., (2024) yang berjudul “*Financial Inclusion in Developing Countries*” tidak secara spesifik mengidentifikasi faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini (PDB per kapita, jumlah bank komersial, dan hambatan infrastruktur) sebagai variabel independen utama dalam penelitiannya, meskipun membahas dimensi inklusi keuangan yang relevan. Kemudian, penelitian tersebut juga tidak mengerucutkan fokus

geografis di kawasan ASEAN. Maka dari itu, belum ada penelitian yang menggabungkan analisis ketiga faktor tersebut seperti PDB per kapita, jumlah bank komersial, dan hambatan infrastruktur dengan fokus penelitian pada negara berkembang menengah di kawasan ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Penelitian ini akan mengisi kekosongan dengan secara spesifik menguji pengaruh variabel-variabel makroekonomi dan infrastruktur yang jelas terhadap inklusi keuangan, yang tidak secara eksplisit menjadi fokus utama atau variabel independen yang diuji dalam penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada tren dan hambatan secara umum, serta pentingnya kebijakan. Dengan menyadari unsur-unsur yang mempengaruhi inklusi keuangan di kawasan ASEAN, diharapkan pemerintah, lembaga keuangan, dan pembuat kebijakan lainnya dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk memperluas akses ke layanan keuangan formal.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan di negara berkembang di kawasan ASEAN dengan fokus penelitian melihat pengaruh dari pendapatan per kapita, jumlah bank komersial, dan hambatan infrastruktur secara keseluruhan di negara berkembang kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dari masalah tersebut sehingga diberi judul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Financial Inclusion* di Negara Berkembang Kawasan ASEAN**”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap *financial inclusion* di negara berkembang kawasan ASEAN?
2. Bagaimana pengaruh jumlah bank komersial terhadap *financial inclusion* di negara berkembang kawasan ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh hambatan infrastruktur terhadap *financial inclusion* di negara berkembang kawasan ASEAN?

4. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita, jumlah bank komersial, dan hambatan infrastruktur terhadap *financial inclusion* di negara berkembang Kawasan ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap *financial inclusion* di negara berkembang kawasan ASEAN.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh jumlah bank komersial terhadap *financial inclusion* di negara berkembang kawasan ASEAN.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh hambatan infrastruktur terhadap *financial inclusion* di negara berkembang kawasan ASEAN.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan per kapita, jumlah bank komersial, dan hambatan infrastruktur terhadap *financial inclusion* di negara berkembang Kawasan ASEAN.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah disampaikan, berikut adalah manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini akan memperkaya literatur ilmiah mengenai *financial inclusion*, khususnya di negara-negara berkembang dengan fokus pada Kawasan ASEAN. Semua hasil penelitian dapat dianggap sebagai referensi bagi studi-studi berikutnya yang berfokus pada topik serupa.
2. Penelitian ini dapat menguji berbagai teori yang berkaitan dengan *financial inclusion*, seperti teori inklusi keuangan, teori pendapatan, teori intermediasi keuangan, dan teori disrupsi inovasi. Temuan dari pengujian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai mekanisme yang berperan dalam proses inklusi keuangan.

3. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi gap-gap penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini dapat menjadi arah bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pengetahuan di bidang *financial inclusion* dalam kawasan ASEAN.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan *financial inclusion*.
2. Bagi lembaga keuangan, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang strategi bisnis yang inklusif. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani.

